

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam rangka mengupayakan pemerataan pendidikan bagi seluruh warga Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang program sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan pendidikan yang bisa dinikmati oleh setiap warga negara agar memperoleh pemerataan pendidikan tanpa memandang anak berkebutuhan khusus maupun normal untuk bisa bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masa depan kehidupannya. Pendidikan inklusif ini sejalan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua (*education for all*).

Dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “Setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”¹ Sedangkan Ayat 2 berbunyi “Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.”²

Pada pasal 11 ayat 1 berbunyi “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Fokus Media, 2011.

² Ibid.

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”³ Sedangkan pada ayat 2 berbunyi “Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.”⁴

Undang-undang di atas, menunjukkan bahwa semua warga Negara usia sekolah mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, serta layanan pendidikan untuk semua “*education for all*”. Hal ini salah satunya diwujudkan oleh pemerintah melalui pendidikan inklusif. Secara umum, pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya, termasuk anak penyandang cacat, anak berbakat, anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas, maupun anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari masyarakat yang rentan akan eksklusi pendidikan. Lebih lanjut, Stubbs mengemukakan bahwa kebijakan dan praktek inklusi anak penyandang cacat telah menjadi katalisator utama untuk mengembangkan pendidikan inklusif yang efektif, yang fleksibel dan tanggap terhadap keanekaragaman gaya dan kecepatan belajar.⁵

Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO tahun 1994 merupakan salah satu dokumen konferensi internasional yang terkait dengan pentingnya pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Dokumen ini

³ Ibid.

⁴ Ibid.

⁵ Sue Stubbs, “Pendidikan Inklusif: Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber (terj. Susi Septaviana R)” *eenet.org.uk*, www.eenet.org.uk/resources/docs/IE_few_resources_Bahasa.pdf, diakses tanggal 20 Maret 2015.

mengemukakan prinsip dasar inklusif yang fundamental. Dalam Konferensi tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Astuti dan Walentiningih menghasilkan kesepakatan negara-negara tingkat dunia akan pentingnya pelaksanaan pendidikan inklusif oleh semua negara di dunia, sehingga setiap sekolah dapat melayani setiap anak termasuk anak berkebutuhan khusus.⁶

Hadirnya pendidikan inklusif di Indonesia merupakan suatu terobosan baru bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus di samping pendidikan segregasi yang telah berjalan. Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada mulanya bersifat segregasi atau terpisah dengan masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaan pendidikannya berbentuk SLB (Sekolah Luar Biasa) yang di dalamnya terdapat spesialisasi-spesialisasi anak berkebutuhan khusus sesuai dengan hambatannya seperti SLB/A (untuk anak tunanetra), SLB/B (untuk anak tunarungu), SLB/C (untuk anak tunagrahita), SLB/D (untuk anak tunadaksa), SLB/E (untuk anak tunalaras). Perkembangan selanjutnya menuju pada pendidikan integratif, yaitu pendidikan yang mengintegrasikan anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler. Dalam pelaksanaannya, pendidikan integratif ini terbatas pada siswa yang mengikuti sistem kurikulum di sekolah reguler. Selanjutnya menuju pada pendidikan inklusif yaitu suatu konsep pendidikan yang tidak membedakan keragaman karakteristik anak.

Pendidikan inklusif hadir dengan sebuah konsep atau pendekatan pendidikan yang berupaya menjangkau semua kondisi psikologis dan fisik anak

⁶ Idayu Astuti dan Olim Walentiningih, *Pakem Sekolah Inklusif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 11.

tanpa terkecuali, sehingga semua anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda memiliki peluang untuk dapat berhasil dalam belajar. Selain itu, Pendidikan inklusif juga menempatkan anak berkelainan tingkat ringan, sedang dan berat secara penuh di kelas reguler, serta semua murid ditampung dalam kelas yang sama, demi mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Sekolah penyelenggara inklusif seyogyanya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mengakomodasi semua anak. Hal ini salah satunya dapat diwujudkan dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan pihak sekolah, misalnya dalam bidang kurikulum, sarana dan prasarana maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Kustawan mengemukakan, bahwa dalam pelaksanaan pendidikan inklusif sekolah penyelenggara inklusif pada dasarnya telah mengadakan suatu perubahan. Perubahan-perubahan tersebut mencakup keseluruhan aspek dalam bidang pendidikan, seperti terbukanya sekolah untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus, pengembangan kurikulum yang bisa mengakomodasikan semua anak, pendekatan/metode pembelajaran, materi/bahan ajar, media pembelajaran, penilaian proses dan hasil belajar, pemeliharaan sarana dan prasarana, manajemen sekolah, bimbingan dan konseling, dan beberapa komponen lainnya berubah menyesuaikan dengan kebutuhan semua anak.⁷

Hal serupa dikemukakan oleh Mohammad Takdir Ilahi bahwa pendidikan inklusif harus mampu menyesuaikan diri dan fleksibel terhadap kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Fleksibilitas tersebut terkait dengan kurikulum,

⁷ Dedy Kustawan, *Manajemen Pendidikan Inklusif* (Jakarta: PT. Luxima Metro media, 2013), 43.

pendekatan pembelajaran, sistem evaluasi, serta mencerminkan pembelajaran yang ramah. Dengan demikian pendidikan inklusif mampu memberikan kemudahan bagi peserta didik berkebutuhan khusus sesuai dengan kecerdasan dan intelektual mereka.⁸

Meskipun demikian, dalam implementasinya sekalipun sudah banyak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, tetap masih banyak yang belum sesuai dengan konsep yang mendasarinya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mohamad Takdir Ilahi bahwa dewasa ini pendidikan inklusif masih banyak dipahami sebagai upaya memasukan peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah reguler, sistem yang ada tidak diubah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik namun peserta didik berkebutuhan khusus yang menyesuaikan dengan sistem yang ada, artinya pendidikan inklusif masih cenderung dipahami sama dengan pendidikan integrasi.⁹

Di Indonesia, salah satu acuan formal mengenai pendidikan inklusif terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk

⁸ Mohammad Takdir Ilahi, *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta: Ar-Ruz media, 2013), 45-47.

⁹ Ibid., 63.

mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.”¹⁰

Pada pasal 4 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa:

1. Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
2. Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh kabupaten/kota dapat menerima peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Kediri telah menunjuk dua sekolah menengah untuk menyelenggarakan program pendidikan inklusif, satu di antaranya adalah SMP YBPK Kediri yang beralamat di Jl. Mayor Bismo No. 52 Kelurahan Semampir Kota Kediri. Berdasarkan studi awal, SMP YBPK Kediri telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebelum ditunjuk sebagai sekolah inklusif. Pada tahun 2011 Dinas Kota Kediri telah meresmikan SMP YBPK Kediri sebagai sekolah inklusif. Pada tahun ajaran 2014-2015 jumlah keseluruhan peserta didik dari kelas VII hingga kelas IX berjumlah 42 anak, dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus sebanyak 18 siswa. Berdasarkan dokumen sekolah terkait SK Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor 420/2894/491.42/2014, SMP ini merupakan SMP yang memiliki peserta didik berkebutuhan khusus lebih banyak dibandingkan SMP lainnya di Kota Kediri.

¹⁰ *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/Bakat Istimewa*, Jakarta: 2009.

¹¹ *Ibid.*

Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tulung Agung juga telah meresmikan beberapa sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Satu di antaranya adalah SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung yang beralamat di Jl. Pahlawan III / 40 Kedungwaru Tulung Agung dan merupakan sekolah di bawah naungan yayasan Islam Al-Azhar. Berdasarkan studi awal, SMP ini telah menerima peserta didik berkebutuhan khusus sejak tahun 2009, kemudian SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung ini resmi menjadi sekolah inklusif pada tahun 2012. Pada tahun ajaran 2014/2015 ini jumlah peserta didik berkebutuhan khusus seluruhnya sebanyak tujuh anak. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhaar, sekolah ini merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat SMP dengan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus terbanyak di Tulung Agung.¹²

Berangkat dari hal tersebut, peneliti ingin mendeskripsikan dan membandingkan bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di salah satu sekolah menengah Kota Kediri dan Tulung Agung. Kedua lokasi tersebut dipilih sebagai situs penelitian dikarenakan dua hal. *Pertama*, kedua sekolah tersebut merupakan sekolah menengah inklusif yang memiliki jumlah peserta didik berkebutuhan khusus terbanyak dibandingkan sekolah menengah inklusif lainnya baik di Kota Kediri maupun di Kabupaten Tulung Agung. *Kedua*, sekolah tersebut merupakan sekolah menengah yang lebih dulu menjalankan pendidikan inklusif dibandingkan sekolah menengah inklusif lainnya di kota Kediri maupun di Kabupaten Tulung Agung, bahkan keduanya juga telah menyelenggarakan pendidikan inklusif jauh sebelum diresmikan sebagai sekolah inklusif, sehingga sistem inklusif yang

¹² Tuti Haryati, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhaar, Tulung Agung, 20 Januari 2015.

dijalankan sudah dapat dievaluasi berulang kali. Persamaan dari kedua sekolah tersebut merupakan alasan peneliti untuk mendeskripsikan dan membandingkan pelaksanaan pendidikan diantara keduanya, namun peneliti tidak menjadikan latar belakang keislaman ataupun kekristenan sebagai alasan perbandingan.

Sekalipun secara formal pendidikan inklusif di Indonesia baru dilaksanakan dalam satu dasa warsa terakhir, namun diyakini bahwa secara alamiah pendidikan inklusif sudah berlangsung sejak lama. Hal ini tidak lepas dari faktor-faktor filosofi, sosial, maupun budaya Indonesia yang sangat menghargai dan menjunjung tinggi kebhinnekaan atau keberagaman. Faktor-faktor ini tentu dapat menjadi modal dasar bagi pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sekarang sedang digalakkan.

Dewasa ini kajian tentang pendidikan inklusif sudah banyak dilakukan, yang tentunya banyak memberi kontribusi dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti merangkumnya ke dalam beberapa kategori, di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Tarmansyah, Rona Fitria, Yachya Hasyim, Lailatul Fadelia, Sumiyati dan Febriana Anjaryati fokus pada pelaksanaan pendidikan inklusif. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Y. Sri Hartono dan Elda Despalantri memfokuskan penelitian pada pelaksanaan pendidikan inklusif berdasarkan indeks inklusi, yang dilakukan dengan menggunakan *mixed method*. Penelitian Nur Mita Apriastuti dan Karwanto memfokuskan pada manajemen sekolah inklusi, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian Mamah Siti Rohmah

memfokuskan pada pelaksanaan pembelajaran PAI dalam setting inklusi, yang merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis pendidikan.

Tarmansyah menggunakan SD 03 Kota Padang sebagai situs penelitiannya, dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwasanya pelaksanaan pendidikan inklusif di SD 03 Kota Padang sebagai sekolah ujicoba sistem pendidikan inklusif belum terlaksana dengan baik dan masih dalam bentuk pendidikan terpadu, karena siswa berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum yang ada di sekolah.¹³ Rona Fitriana menggunakan SD Negeri 18 Koto Luar Kecamatan Pauh sebagai situs penelitiannya, dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwasanya rancangan pembelajarannya berbentuk RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan PPI (Program Pembelajaran Individual), metode pembelajaran belum bervariasi, media disesuaikan dengan materi pembelajaran, materi yang disampaikan diambil dari paket dan disederhanakan oleh guru pembimbing khusus, penilaiannya hanya berbentuk lisan serta kendala yang dihadapi adalah peserta didik yang bervariasi menyebabkan guru terkendala dalam menggunakan metode yang bervariasi.¹⁴

Yachya Hasyim menggunakan SMK Negeri 2 Malang sebagai situs penelitiannya berkesimpulan bahwa pendidikan inklusif di SMK Negeri 2 Malang telah berlangsung selama 3 tahun, diikuti oleh peserta didik inklusif dengan berbagai macam jenis ketunaan, diajar oleh guru pendamping khusus yang

¹³ Tarmansyah, "Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SD 03 Alai Padang Utara Kota Padang: Sebuah Studi Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah Uji Coba Sistem Pendidikan Inklusif", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol IX No. 01 (April, 2009), 1.

¹⁴ Rona Fitria, "Proses Pembelajaran dalam Setting Inklusi di Sekolah Dasar", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, Vol. 1 No. 1 (Januari, 2012), 90.

profesional dan kurikulum yang dipakai adalah kurikulum modifikasi serta para peserta didik inklusif diterima kehadirannya di SMK Negeri 2 Malang, sedangkan sarana belajar dan praktek kerja sudah tersedia.¹⁵

Penelitian yang dilakukan Lailatul Fadelia lebih rinci lagi terfokus pada pembelajaran PAI dalam setting inklusi, menggunakan SMPN 4 Sidoarjo sebagai situs penelitiannya, hasil penelitian yang diperoleh yaitu perencanaan pembelajaran disusun dalam satu periode namun guru bidang studi PAI tidak melakukan modifikasi untuk siswa yang berkebutuhan khusus, Implementasi *cooperative learning* dapat meningkatkan partisipasi siswa, evaluasi pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik tanpa berkebutuhan khusus lainnya masih disamakan.¹⁶ Dari temuan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusif dalam pembelajaran PAI belum terlaksana dengan baik.

Sumiyati menggunakan TK Rumah Citta Yogyakarta sebagai situs penelitiannya, penelitian tersebut selain mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan inklusif juga menganalisis kurikulum yang digunakan. Hasil dari penelitian tersebut diantaranya kurikulum yang digunakan memodifikasi kurikulum regular, menganut model kurikulum inklusi yang dikemukakan oleh NS. Vijaya K.N. Implementasi kurikulumnya dilaksanakan dengan mengutamakan kebutuhan anak, implementasi kurikulum yang telah diramu tersebut memberikan banyak manfaat namun masih

¹⁵ Yachya Hasyim, "Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang", *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2 (Juli, 2013), 112.

¹⁶ Lailatul Fadeliyah, "Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Program Pendidikan Inklusi di SMPN 4 Sidoarjo" (Tesis MA, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014), vii.

ditemukan beberapa kendala seperti kelas yang tidak luas dan ketidak tersediaan guru pendamping khusus.¹⁷

Penelitian Febriana Anjaryati menggunakan PAUD Inklusi Ahsanu Amala Yogyakarta sebagai lokasi penelitian, penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan inklusi dalam pembelajaran *Beyond Centers and Circle Times* (BCCT), adapun hasil penelitiannya adalah pembelajaran dilaksanakan melalui perencanaan kegiatan belajar di awal semester dan teknis pelaksanaan dipersiapkan satu bulan atau satu minggu sebelum kegiatan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran di sentra-sentra main, proses pembelajaran dilakukan dengan standar operasional buku yang terdiri dari empat pijakan, serta evaluasi yang terdiri dari evaluasi program dan evaluasi perkembangan anak. Hasil yang diperoleh adalah peserta didik berkebutuhan khusus mengalami banyak kemajuan.¹⁸

Y. Sri Hartono menggunakan SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin sebagai situs penelitiannya. Penelitian tersebut berpedoman pada indeks pelaksanaan pendidikan inklusif yang dikembangkan *Center for Studies on Inclusive Education*, adapun hasil dari penelitian tersebut diantaranya indeks budaya inklusi mencapai 88,91%, kemudian indeks kebijakan inklusi 70,92%, dan indeks praktik inklusi 79,95% dengan demikian bisa diketahui indeks inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 79,92% dari yang diharapkan atau dalam kategori baik. Secara rinci indikator budaya inklusi masih belum optimal dalam hal kerjasama

¹⁷ Sumiyati, "Analisis Kurikulum Pendidikan Inklusi dan Implementasinya di Taman Kanak-Kanak (TK) Rumah Citta Yogyakarta" (Tesis MA, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), vi.

¹⁸ Febriana Anjaryati, "Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran *Beyond Centers and Circle Times* (BCCT) di PAUD Inklusi Ahsanu Amala Yogyakarta" (Tesis MA, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), viii.

antara guru kelas dan Guru Pembimbing Khusus (GPK), label antar siswa masih terjadi. Pada indikator kebijakan ditemukan belum adanya dukungan pelajaran kekhususan bagi peserta didik berkebutuhan khusus, keberadaan GPK belum diintensifkan, pelatihan pembelajaran kolaboratif belum menyentuh semua kalangan guru, dalam visi dan misi sekolah belum sepenuhnya mencantumkan karakteristik pendidikan inklusif. Sedangkan indikator praktik guru masih terlihat menggunakan pegajaran secara klasikal, materi kurikulum juga belum disusun sepenuhnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus.¹⁹

Elda Despalantri dengan Kota Payakumbuh sebagai situs penelitiannya. Penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian Y. Sri Hartono, keduanya mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan inklusif berdasarkan Indeks Inklusi. Adapun hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwasanya pendidikan inklusif di SMP Negeri Payakumbuh tergolong dalam kategori “baik”. Hal ini dibuktikan dari perolehan data yang menempati rentan skor 61%-80%. Sedangkan data kualitatif yang didapat menunjukkan bahwa budaya, kebijakan, dan praktek inklusif belum terlaksana dengan sempurna. Tetapi keempat sekolah yang diteliti telah berusaha untuk melaksanakan pendidikan inklusif yang terbaik.²⁰

Nur Mita Apriastuti dan Karwanto, melakukan penelitian di SD N Babatan V Surabaya, penelitian ini mengungkap peran kepala sekolah dalam mengelola pendidikan inklusi di SD N Babatan V Surabaya. Penelitian ini berangkat dari

¹⁹Y. Sri Hartono, “Indeks Inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin: Studi Tentang Keberhasilan Implementasi Pendidikan Inklusif Tahun 2010” (Tesis MA, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010).

²⁰ Elda Despalantri, “Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kota Payakumbuh Berdasarkan Indeks Inklusi” (Tesis MA, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014).

fenomena sekolah inklusi yang peserta didik berkebutuhan khususnya terbanyak sewilayah Surabaya, bayaknya prestasi yang diraih oleh peserta didik berkebutuhan khusus, kepala sekolah SD N Babatan V Surabaya yang menjabat sebagai sekertaris Sekolah Inklusi Sewilayah Surabaya, adanya peningkatan kualitas pendidik melalui diklat, dan kerja sama yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan puskesmas imunisasi anak.²¹

Mamah Siti Rohmah dengan sumber utama penelitiannya adalah Koordinator *Special Educational Need Unit* (SEN Unit), guru-guru SEN Unit, guru-guru Pendidikan Agama Islam, dan data-data terkait pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus, yang diperoleh melalui observasi, *deep Interview*, maupun studi dokumentasi di *Madania Progressive Indonesian School* Parung Bogor. Adapun hasil penelitian ini adalah menolak pendapat Evelyn Deno dan Kauffman yang mempertahankan model pendidikan dengan alternative penempatan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus secara khusus dan terpisah dari anak normal. Penelitian ini memperkuat pendapat Stainback dan Stainback, Staub dan Peck, Sapon Shevin dan Bandi Delphie yang menyetujui pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk dapat belajar bersama-sama dengan anak normal lainnya.²²

Posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang telah ada memiliki perbedaan, perbedaan tersebut dapat dilihat dari dua hal. *Pertama*, beberapa penelitian di atas mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan inklusif, namun

²¹ Nur Mita Apriastuti dan Karwanto, "manajemen sekolah inklusi di SD N Babatan V Surabaya", *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, Vol. 3 No. 3 (Januari, 2014), 156.

²² Mamah Siti Rohmah, "Pendidikan Agama Islam dalam Setting Inklusi" (Tesis MA, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), v.

penelitian-penelitian tersebut tidak mengkomparasikan antara satu objek dengan objek lain, sementara penelitian ini di samping mendeskripsikan pelaksanaan pendidikan inklusif juga membandingkan antara dua objek, yaitu sekolah penyelenggara inklusif di Kota Kediri dan sekolah penyelenggara inklusif di Kabupaten Tulung Agung. *Kedua*, lokasi yang dijadikan penelitian dari penelitian-penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini. Beberapa penelitian di atas dilakukan di daerah yang telah banyak menjalankan pendidikan inklusif dan mayoritas berada di kota besar. Sementara penelitian ini dilakukan di daerah yang belum banyak menjalankan pendidikan inklusif dan berada di kota kecil.

Berdasarkan dari telaah di atas juga dapat diambil kesimpulan bahwa masih ada beberapa sekolah yang menjalankan pendidikan inklusif belum sesuai dengan konsep yang mendasarinya, artinya sebagaimana peneliti uraikan sebelumnya bahwa masih ada beberapa sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif sebagaimana pendidikan integrasi. Hal ini juga menjadi salah satu alasan peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar tulung Agung sekaligus membandingkan pelaksanaan di antara keduanya, sehingga judul penelitian ini adalah **“Studi Multi Situs Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung”**.

Dengan berpijak pada beberapa pendapat dan pedoman dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, bahwa pada dasarnya sekolah penyelenggara inklusif harus melakukan beberapa perubahan baik dalam hal kurikulum, manajemen sekolah, sarana dan prasarana serta keseluruhan aspek pendidikan, maka penelitian ini

dibatasi dengan memfokuskan pada perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran dan apakah pelaksanaan pendidikan inklusif tersebut dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik berkebutuhan khusus di SMP YBPK Kediri dan di SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung. Untuk penggunaan istilah Anak Berkebutuhan Khusus dan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam skripsi ini memiliki maksud yang sama, namun istilah Peserta Didik berkebutuhan Khusus lebih sempit hanya mencangkup anak-anak yang memiliki kelainan dalam konteks pendidikan yang sudah masuk sekolah. Sedangkan istilah Anak Berkebutuhan Khusus dimaksudkan bagi seluruh anak yang meiliki kelainan dalam konteks pendidikan baik yang sudah maupun yang belum sekolah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang berorientasi pada pelaksanaan sitem pendidikan inklusif, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana perencanaan pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung?
2. Bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung sebagai sekolah penyelenggara inklusif?
3. Bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung sebagai sekolah penyelenggara inklusif?

4. Bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung dalam meningkatkan prestasi peserta didik berkebutuhan khusus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan membandingkan secara objektif tentang pelaksanaan pendidikan inklusif pada salah satu sekolah menengah penyelenggara inklusif Kota Kediri dan Kabupaten Tulung Agung, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa rumusan masalah di atas. Secara lebih rinci tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui perencanaan pembelajaran yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung
2. Untuk mengetahui pelaksanaan proses pembelajaran di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung sebagai sekolah penyelenggara inklusif
3. Untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi pembelajaran di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung sebagai sekolah penyelenggara inklusif
4. Untuk mengetahui implikasi pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung dalam meningkatkan prestasi peserta didik berkebutuhan khusus

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Secara Teoritis

Dapat menambah khasanah keilmuan dalam pendidikan, khususnya tentang pelaksanaan pendidikan inklusif

2. Secara Praktis

- a. Bagi Lembaga

Dapat digunakan sebagai referensi dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SMP YBPK Kediri dan SMP Islam Al-Azhaar Tulung Agung

- b. Bagi Peneliti

Dapat menambah informasi tentang bahan kajian, dan menambah wawasan pengetahuan tentang sejauh mana pelaksanaan pendidikan inklusif dalam dunia pendidikan.

- c. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Dan dapat dijadikan pedoman untuk memberikan pelayanan yang sesuai pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus. Karena pada dasarnya peserta didik berkebutuhan khusus masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan, dengan memberikan layanan pendidikan yang sesuai.